

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam dalam sejarah Indonesia tidak hanya hadir sebagai sistem kepercayaan individual, tetapi juga sebagai kekuatan sosial, budaya, dan politik yang membentuk dinamika masyarakat. Islam sejak awal berkembang sebagai basis peradaban yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk kekuasaan, hukum, dan identitas kolektif umat.¹ Perjalanan sejarah umat Islam menunjukkan bahwa aspirasi keagamaan sering kali berkelindan dengan kepentingan sosial-politik, terutama ketika negara dianggap gagal mewakili nilai-nilai keadilan yang diyakini masyarakat Muslim.²

Keadaan tersebut menjelaskan mengapa dalam konteks sejarah Indonesia, gerakan Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional. Relasi antara Islam dan kekuasaan bersifat dinamis: kadang kooperatif, tetapi pada situasi tertentu berubah menjadi resistif, khususnya ketika ruang ekspresi politik umat Islam dibatasi oleh negara.

Sejarah pergerakan Islam radikal di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam kajian politik dan keamanan. Salah satu peristiwa penting yang mencerminkan dinamika ini adalah gerakan Komando Jihad yang berlangsung pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an. Gerakan ini muncul sebagai bagian dari upaya kelompok Islamis untuk menegakkan Negara Islam Indonesia (NII), yang sebelumnya telah diproklamlirkan oleh DI/TII di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo pada 1949.³

Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik dan keamanan di Indonesia. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat pasca-kemerdekaan, khususnya terkait dengan implementasi hukum Islam

¹ Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12–15.

² Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, hlm. 21-24

³ C. van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*, (Leiden: Brill, 1981), hlm. 75-80

dalam sistem pemerintahan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan berawal dari Jawa Barat sebelum akhirnya menyebar ke berbagai wilayah lain di Indonesia, seperti Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Sejarah berdirinya DI/TII tidak terlepas dari dinamika sosial-politik yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, terjadi ketidakstabilan politik yang dipicu oleh perbedaan ideologi antara kelompok nasionalis dan Islamis. Ketidakpuasan terhadap sistem negara kesatuan yang diadopsi oleh pemerintah pusat mendorong Kartosoewirjo untuk mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat.⁴ Deklarasi ini menjadi titik awal konflik berkepanjangan antara DI/TII dan pemerintah Republik Indonesia.

Salah satu faktor utama yang mendorong munculnya DI/TII adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan kelompok Islam. Kartosoewirjo, yang merupakan tokoh utama gerakan ini, menganggap bahwa Republik Indonesia telah gagal menerapkan syariat Islam sebagai dasar negara. Selain itu, kekecewaan terhadap hasil Perjanjian Renville pada 1948, yang mengharuskan pasukan TNI mundur dari wilayah yang dikuasai Belanda termasuk Jawa Barat, memperparah situasi dan memperkuat tekad Kartosoewirjo untuk mendirikan negara Islam secara mandiri.⁵

DI/TII bukan hanya merupakan gerakan separatis berbasis ideologi Islam, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menumpas gerakan ini melalui operasi militer dan pendekatan diplomasi. Operasi penumpasan DI/TII yang paling terkenal adalah Operasi Pagar Betis yang berhasil menangkap Kartosoewirjo pada 1962. Setelah eksekusi Kartosoewirjo pada 1962, gerakan DI/TII mulai melemah dan akhirnya berakhir secara formal.⁶

⁴ C.A. Oey, *Islamic State of Indonesia and Its Struggle for Independence*, (The Hague: Mouton, 1982), hlm. 45.

⁵ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2: Meluruskan Sejarah Islam di Indonesia*, (Bandung: Salamadani, 2010), hlm. 240.

⁶ Ken Conboy, *Komando: Elite Operations in Indonesia*, (Jakarta: Equinox Publishing, 2003), hlm. 120.

Meskipun telah berakhir secara formal, warisan ideologi DI/TII masih dapat ditemukan dalam berbagai kelompok radikal Islam di Indonesia. Beberapa kelompok memiliki keterkaitan historis dengan ideologi yang dikembangkan oleh DI/TII.⁷

Salah satu warisan langsung dari DI/TII adalah lahirnya kelompok-kelompok ekstremis yang menjadikan ideologi Kartosoewirjo sebagai dasar perjuangan mereka. Salah satu kelompok yang muncul sebagai kelanjutan dari DI/TII adalah Komando Jihad. Komando Jihad mulai muncul pada era 1970-an dan sering dikaitkan dengan mantan anggota DI/TII yang tetap mempertahankan keyakinan mereka terhadap konsep Negara Islam Indonesia (NII) meskipun gerakan DI/TII telah diberangus oleh pemerintah.⁸

Gerakan Komando Jihad dihapus dari ideologi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang sebelumnya berjuang untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di bawah kepemimpinan Kartosoewirjo pada tahun 1949.⁹ Meskipun DI/TII berhasil ditumpas pada awal tahun 1960-an, warisan ideologinya tetap bertahan di kalangan pengikutnya, yang kemudian berkembang menjadi berbagai kelompok radikal, termasuk Komando Jihad.¹⁰

Lahirnya gerakan Komando Jihad sebenarnya tidak lepas dari diproklamasikan berdirinya "Negara Islam Indonesia" oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di desa Malabong, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Gerakan yang dikenal dengan nama lain Darul Islam ini berpusat di Jawa Barat dengan meluaskan pengaruhnya hingga ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pimpinan Darul Islam ini adalah Kartosoewirjo adalah seorang pemimpin pergerakan umat Islam yang semenjak zaman Hindia Belanda telah lama mencita-citakan berdirinya suatu Negara Islam di Indonesia. Ia telah dari sejak awal

⁷ Solahudin, *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*, (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 60.

⁸ Greg Fealy dan Aldo Borgu, *Local Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesia*, (Sydney: Australian Strategic Policy Institute, 2005), hlm. 78.

⁹ CA Oey, *Negara Islam Indonesia dan Perjuangan Kemerdekaannya*, (Den Haag: Mouton, 1982), hlm. 45.

¹⁰ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2: Meluruskan Sejarah Islam di Indonesia*, (Bandung: Salamadani, 2010), hlm. 240.

mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Belanda dan berjuang tidak secara ko-operatif dan tidak mau melalui parlemen atau partai politik yang pernah dimasukinya yaitu PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) maupun Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).¹¹

Komando Jihad merupakan salah satu gerakan radikal Islam yang muncul di Indonesia pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an. Gerakan ini diyakini sebagai kelanjutan dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang sebelumnya berjuang untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di bawah kepemimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Walaupun DI/TII secara resmi ditumpas oleh pemerintah pada awal tahun 1960-an dengan eksekusi Kartosoewirjo, jaringan ideologi dan militansi para pengikutnya tetap bertahan dan berkembang dalam bentuk kelompok-kelompok baru, termasuk Komando Jihad.¹²

Lahirnya Komando Jihad juga tidak terlepas dari berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi pada masa Orde Baru. Rezim Soeharto, yang berkuasa sejak tahun 1966, menerapkan kebijakan yang keras terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Pemerintah berupaya menekan gerakan-gerakan Islam radikal dengan berbagai cara, termasuk operasi militer dan pengawasan ketat terhadap aktivitas keagamaan. Namun, pada saat yang sama, kebijakan represif pemerintah justru menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kelompok Islam yang garis keras, yang merasa bahwa hak mereka untuk menjalankan syariat Islam diabaikan. Kondisi ini memicu munculnya kembali gerakan radikal yang mengusung perjuangan Islam, salah satunya adalah Komando Jihad.¹³

Faktor lain yang ikut berkontribusi terhadap munculnya Komando Jihad adalah adanya jaringan internasional yang mendukung gerakan Islam radikal. Pada dekade 1970-an, terjadi peningkatan aktivitas jihad global, terutama setelah invasi Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979. Banyak pejuang Islam dari berbagai negara, termasuk Indonesia, terlibat dalam konflik tersebut dan mendapatkan

¹¹ Al-Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), hal. 50.

¹² CA Oey, *Negara Islam Indonesia dan Perjuangan Kemerdekaannya*, hlm. 45.

¹³ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2: Meluruskan Sejarah Islam di Indonesia*, hlm. 240.

pelatihan militer di kamp-kamp jihad di Pakistan dan Afghanistan. Para pejuang ini kemudian kembali ke negara asal mereka dengan membawa pengalaman perang serta ideologi jihad yang lebih kuat. Beberapa di antara mereka kemudian bergabung atau membentuk kelompok-kelompok baru, termasuk Komando Jihad.¹⁴

Selain itu, keterlibatan aparat keamanan dalam fenomena ini juga menjadi bagian dari kompleksitas masalah. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Komando Jihad awalnya merupakan operasi kontra-intelijen yang dimanfaatkan oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) untuk mempengaruhi kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia. Pemerintah Orde Baru menggunakan strategi "false flag Operation" dengan membiarkan kelompok ini berkembang untuk kemudian ditindak secara tegas guna memperkuat legitimasi rezim dalam menjaga stabilitas nasional. Namun, operasi ini tidak sepenuhnya berhasil dikendalikan, dan Komando Jihad berkembang menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional.¹⁵

Komando Jihad beroperasi dengan tujuan menerapkan syariat Islam secara penuh dan menumbangkan pemerintahan yang dianggap sekuler. Kelompok ini terlibat dalam berbagai aksi kekerasan dan terorisme, termasuk serangan bom dan penculikan. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah penyerangan markas polisi di Cicendo, Bandung, pada tahun 1977 yang dilakukan oleh anggota Komando Jihad.¹⁶

Komando Jihad juga memiliki hubungan erat dengan jaringan Islam radikal internasional. Beberapa anggotanya mendapatkan pelatihan militer di luar negeri, khususnya di Pakistan dan Afghanistan, tempat mereka bertemu dengan kelompok-kelompok jihad global. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi yang pertama kali diperkenalkan oleh DI/TII telah berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dan memiliki jaringan internasional.¹⁷

¹⁴ Ken Conboy, *Komando: Operasi Elit di Indonesia*, hlm. 120.

¹⁵ Solahudin, *Akar Terorisme di Indonesia: Dari Darul Islam Hingga Jema'ah Islamiyah*, hlm. 60.

¹⁶ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 2006), hlm. 90.

¹⁷ Sidney Jones, *Indonesian Extremism and the International Context*, (Jakarta: International Crisis Group, 2011), hlm. 25.

Selain itu, strategi perekrutan yang digunakan oleh Komando Jihad juga mirip dengan yang diterapkan oleh DI/TII, yaitu melalui sistem sel tertutup dan hubungan personal antara anggota. Banyak dari anggota Komando Jihad berasal dari keluarga atau keturunan mantan anggota DI/TII yang masih menyimpan keyakinan bahwa perjuangan Negara Islam Indonesia belum selesai.¹⁸

Gerakan Komando Jihad mencapai puncak aksinya pada akhir tahun 1970-an dengan berbagai serangan teror dan aksi kekerasan. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah serangan terhadap Markas Polisi di Cicendo, Bandung, pada tahun 1977, yang menyebabkan ketegangan antara kelompok Islam radikal dan pemerintah semakin meningkat. Pemerintah menanggapi ancaman ini dengan melakukan operasi besar-besaran, termasuk penangkapan dan eksekusi terhadap anggota Komando Jihad.¹⁹

Dampak keberadaan Komando Jihad tidak hanya dirasakan pada era Orde Baru, tetapi juga memberikan pengaruh jangka panjang terhadap dinamika gerakan Islam radikal di Indonesia. Setelah kelompok ini berhasil ditumpas, ideologi dan jaringan mereka tidak sepenuhnya hilang. Sebagian besar mantan anggota Komando Jihad kemudian berafiliasi dengan kelompok radikal lainnya yang muncul di era Reformasi, seperti Jamaah Islamiyah (JI) dan kelompok-kelompok jihad lainnya.²⁰

Pemerintah Indonesia merespons ancaman Komando Jihad dengan melakukan operasi militer dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pada akhir 1980-an, banyak anggota Komando Jihad yang berhasil ditangkap atau dihukum mati. Namun, ideologi mereka tetap bertahan dan terus berkembang, terutama dalam bentuk kelompok-kelompok radikal baru yang muncul pada era reformasi, seperti Jamaah Islamiyah dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).²¹

¹⁸ Zachary Abuza, *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2003), hlm. 54.

¹⁹ Greg Fealy dan Aldo Borgu, *Jihad Lokal: Islam Radikal dan Terorisme di Indonesia*, hlm. 78.

²⁰ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, hlm. 90.

²¹ Julie Chernov Hwang, *Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists*, (Ithaca: Cornell University Press, 2018), hlm. 112.

Dalam konteks lokal, seperti di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, jejak Komando Jihad masih dapat ditemukan dalam bentuk jaringan sosial dan ideologi yang bertahan di masyarakat. Wilayah ini memiliki sejarah panjang sebagai basis perlawanan Islam, terutama sejak era DI/TII. Kondisi geografis yang terpencil serta adanya hubungan sosial yang kuat di antara komunitas Islam yang konservatif menjadikan Pakenjeng sebagai salah satu tempat yang strategis bagi pergerakan bawah tanah Komando Jihad. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sejarah dan sosial budaya memainkan peran penting dalam perpindahan gerakan radikal di Indonesia.²² Wilayah ini dikenal memiliki jejak historis kuat terkait dengan perlawanan terhadap negara, terutama dalam konteks pergerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang masih memiliki sisa pengaruh di Masyarakat.²³ Hal ini disebabkan oleh faktor geografis yang mendukung gerakan bawah tanah serta adanya jaringan sosial yang masih berafiliasi dengan ideologi radikal.

Gerakan Komando Jihad di Pakenjeng tidak hanya berimplikasi pada konflik sosial, tetapi juga menimbulkan respons keras dari pemerintah Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Pemerintah, melalui operasi militer dan pendekatan represif, berusaha meredam gerakan ini dengan berbagai strategi, termasuk operasi penangkapan dan pembubaran jaringan gerakan yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional.²⁴

Gerakan Komando Jihad di Pakenjeng tidak dapat dilepaskan dari konteks politik nasional pada masa itu. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menerapkan kebijakan represif terhadap kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara, termasuk organisasi Islam yang dicurigai memiliki afiliasi dengan gerakan ekstremis. Hal ini terkait dengan pengalaman Indonesia pada periode 1949-1965, di mana gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) berusaha mendirikan negara Islam di

²² Sidney Jones, *Ekstremisme Indonesia dan Konteks Internasional*, hlm. 25.

²³ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah*, (Depok: Pustaka IIMaN, 2016), hlm. 320-325.

²⁴ Ken Conboy, *Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service*, (Jakarta: Equinox Publishing, 2004), hlm. 120-125.

berbagai daerah, termasuk Jawa Barat. Beberapa mantan anggota DI/TII yang tidak menyerah kepada pemerintah diyakini menjadi bagian dari jaringan yang kemudian membentuk Komando Jihad.²⁵

Pakenjeng sebagai salah satu daerah di Kabupaten Garut memiliki topografi yang mendukung aktivitas gerakan bawah tanah. Wilayahnya yang berbukit dan jauh dari pusat pemerintahan menjadi tempat persembunyian yang strategis. Selain itu, secara sosiologis, komunitas masyarakat di daerah ini masih memiliki keterikatan dengan nilai-nilai keislaman yang kuat, yang dalam beberapa kasus dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya.²⁶

Pada periode 1976-1981, aktivitas Komando Jihad di Pakenjeng ditandai dengan beberapa peristiwa penting, seperti penyebaran propaganda, pelatihan militer secara rahasia, dan perencanaan aksi bersenjata. Pemerintah melalui aparat keamanan melakukan berbagai operasi penumpasan terhadap kelompok ini, yang berujung pada penangkapan dan penindakan terhadap beberapa tokohnya. Namun, masih banyak pertanyaan yang muncul mengenai bagaimana gerakan ini bisa berkembang di daerah tersebut, serta bagaimana pola rekrutmen, strategi perjuangan, dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat setempat.²⁷

Kajian terhadap gerakan Komando Jihad di Kecamatan Pakenjeng menjadi penting tidak hanya untuk memahami dinamika gerakan Islam radikal di Indonesia pada masa Orde Baru, tetapi juga untuk memberikan wawasan terhadap bagaimana negara merespons ancaman tersebut. Dengan menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculan dan perkembangan gerakan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian sejarah politik dan gerakan Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

²⁵ Crouch, Harold. *Military and Politics in Indonesia*. Cornell University Press, 1988, hlm. 112.

²⁶ Van Dijk, Kees. *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*. Brill, 1981, hlm. 205.

²⁷ Abuza, Zachary. *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*. Lynne Rienner Publishers, 2003, hlm. 78.

Mempertimbangkan permasalahan yang sudah diungkapkan sebelumnya. Penulis berupaya merumuskan masalah dalam melakukan penelitian Gerakan Komando Jihad di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut 1976-1981, sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kemunculan Gerakan Komando Jihad di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut pada tahun 1976-1981?
2. Bagaimana pola gerakan, strategi, serta dampak sosial-politik dari aktivitas Komando Jihad di Kecamatan Pakenjeng selama periode 1976-1981?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Gerakan Komando Jihad di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut 1976-1981 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Gerakan Komando Jihad di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut pada periode 1976-1981.
2. Untuk mengetahui pola gerakan, strategi, serta dampak sosial-politik dari aktivitas Komando Jihad di Kecamatan Pakenjeng selama periode 1976-1981?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian sejarah mengenai Gerakan Komando Jihad di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut 1976-1981, memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini berkaitan dengan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya, terutama dalam kajian mengenai gerakan radikal Islam di Indonesia pada era Orde Baru. Beberapa manfaat teoretis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Memperkaya Historiografi Indonesia

Sejarah Indonesia selama ini lebih banyak membahas peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tingkat nasional, sementara kajian tentang gerakan radikal di tingkat lokal masih terbatas. Penelitian mengenai Gerakan Komando Jihad di Kecamatan Pakenjeng dapat memberikan perspektif baru dalam historiografi Indonesia, khususnya terkait dengan perkembangan

ideologi radikal di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya penelitian ini, para sejarawan dan sejarawan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana gerakan radikal berkembang di tingkat lokal dan bagaimana dinamika sosial-politik di daerah tersebut mempengaruhi pergerakan kelompok ini.

b. Menganalisis Faktor Penyebab Munculnya Gerakan Radikal

Setiap gerakan radikal memiliki latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan ideologi yang beragam. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya dan berkembangnya Komando Jihad di Pakenjeng, baik dari sisi kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat, pengaruh ideologi yang masuk, maupun kebijakan pemerintah yang mungkin menjadi pemicu perlawanan. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, penelitian ini dapat membantu memahami pola radikalisasi dan memberikan wawasan bagi para pelajar dan peneliti dalam mengembangkan teori tentang radikalisme di Indonesia.

c. Menjelaskan Teori Tentang Pola Gerakan Radikal

Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan teori mengenai bagaimana gerakan radikal terbentuk, bagaimana mereka merekrut anggota, strategi yang digunakan dalam menyebarkan ideologi, serta bagaimana mereka menghadapi tekanan dari pemerintah. Dengan meneliti pola pergerakan Komando Jihad di Pakenjeng, para akademisi dapat membandingkan dengan kasus-kasus gerakan radikal lain di berbagai wilayah Indonesia, sehingga dapat ditemukan pola umum yang mungkin berlaku dalam konteks yang lebih luas.

d. Memberikan Wawasan Tentang Tanggapan Pemerintah Terhadap Gerakan Radikal

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pemerintah Orde Baru menanggapi kemunculan Komando Jihad di Pakenjeng. Respons pemerintah bisa berupa tindakan represif, kebijakan kontra-radikalisasi, atau pendekatan sosial-ekonomi untuk meredam gerakan ini. Dengan memahami secara nasional bagaimana kebijakan pemerintah di

masa lalu dalam menangani kelompok radikal, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kebijakan keamanan saat ini dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan manfaat bagi teori pengembangan dan historiografi, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, serta akademisi yang mendalami isu radikalisme. Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

a. Sebagai Referensi Bagi Pemerintah Dalam Merancang Kebijakan Keamanan

Dengan memahami bagaimana Gerakan Komando Jihad terbentuk dan berkembang di Pakenjeng, pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam merancang kebijakan pencegahan terhadap munculnya kembali gerakan serupa di masa depan. Pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor pemicu radikalisasi dan menyusun strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi kelompok radikal, baik melalui pendekatan keamanan maupun program deradikalisasi.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme

Masyarakat yang memahami sejarah gerakan radikal di daerah mereka akan lebih waspada terhadap potensi penyebaran ideologi serupa di masa kini. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana radikalisme muncul dan berkembang, serta bagaimana mereka dapat berperan dalam mencegah penyebaran paham tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan radikalisasi melalui pendidikan, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta membangun ketahanan sosial terhadap ideologi ekstrem.

c. Memberikan kontribusi bagi pendidikan sejarah dan kajian akademik

Penelitian ini dapat dijadikan bahan terbuka dalam pendidikan sejarah, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Dengan adanya kajian yang lebih rinci mengenai Gerakan Komando Jihad di Pakenjeng, mahasiswa dan akademisi dapat memperoleh wawasan baru mengenai

sejarah pergerakan radikal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam kajian ilmu politik, kajian keamanan, dan ilmu sosial lainnya yang membahas tentang radikalisme dan terorisme.

d. Menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan studi tentang radikalisme

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh sejarawan dan peneliti lain sebagai inspirasi dalam mengembangkan studi lebih lanjut mengenai radikalisme di Indonesia. Dengan adanya data sejarah yang lebih rinci mengenai Gerakan Komando Jihad di Pakenjeng, para peneliti dapat melakukan studi komparatif dengan gerakan serupa di daerah lain atau dalam periode yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam memahami bagaimana pola gerakan radikal di masa lalu dapat diulangi dalam bentuk yang berbeda di masa kini.

e. Membantu lembaga keamanan dan organisasi sosial dalam memahami radikalisme lokal

Lembaga keamanan seperti kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memahami bagaimana gerakan radikal dapat tumbuh di daerah tertentu dan bagaimana pendekatan yang paling efektif untuk mencegahnya. Selain itu, organisasi sosial yang bergerak di bidang deradikalisasi dan pencegahan ekstremisme juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar dalam merancang program-program yang lebih efektif untuk membendung penyebaran ideologi radikal.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka acuan yang mengarah pada pemahaman mengenai dinamika konflik dan keamanan dengan studi kasus Gerakan Komando Jihad (1976–1981) di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Teori yang relevan dengan kajian ini yaitu teori Gerakan sosial

Sidney Tarrow dalam "Power in Movement" menyatakan bahwa gerakan sosial sering kali muncul akibat peluang politik (political opportunities),

ketersediaan sumber daya (resource mobilization), dan pembingkaiian isu (framing).²⁸ Dengan menggunakan teori gerakan sosial, dapat dianalisis bagaimana Komando Jihad memanfaatkan momentum sosial dan politik pada masa Orde Baru untuk membangun jaringan serta merekrut anggota.

Doug McAdam, John D. McCarthy, dan Mayer N. Zald juga menambahkan bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial sangat bergantung pada organisasi, kepemimpinan, serta kemampuan mereka dalam membangun solidaritas kolektif.²⁹ Dalam konteks Komando Jihad, teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana kelompok ini membentuk jaringan dan mengorganisir aksi mereka.

1. Konsep Dasar Teori Gerakan Sosial

Sidney Tarrow mengemukakan bahwa gerakan sosial muncul saat terbuka peluang politik, seperti ketidakseimbangan kekuasaan, krisis legitimasi rezim, atau pelemahan kontrol negara terhadap masyarakat. Ia menyebutkan tiga unsur utama dalam dinamika gerakan sosial:

- a. Political Opportunity Structure (Peluang Politik): gerakan muncul saat negara melemah atau terbuka untuk kritik.
- b. Resource Mobilization (Mobilisasi Sumber Daya): meliputi jaringan sosial, keuangan, dan komunikasi.
- c. Framing (Pembingkaiian Isu): kemampuan membentuk wacana yang membuat perjuangan tampak sah dan bermakna bagi pendukungnya.³⁰

Teori ini juga didukung oleh pendekatan Doug McAdam, John D. McCarthy, dan Mayer Zald yang menekankan pentingnya organisasi, solidaritas kolektif, dan struktur mobilisasi dalam mendukung keberlangsungan gerakan sosial.³¹

²⁸ Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (New York: Cambridge University Press, 1998), hlm. 120.

²⁹ Doug McAdam, John D. McCarthy, dan Mayer N. Zald, *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings* (New York: Cambridge University Press, 1996), hlm. 95.

³⁰ Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, (New York: Cambridge University Press, 1998), hlm. 18–21.

³¹ Doug McAdam, John D. McCarthy, dan Mayer N. Zald, *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, (New York: Cambridge University Press, 1996), hlm. 2–5.

2. Aplikasi dalam Konteks Gerakan Komando Jihad di Pakenjeng

Dalam konteks *Gerakan Komando Jihad* di Kecamatan Pakenjeng:

a. Struktur Peluang Politik

Pada masa Orde Baru, meskipun negara bersikap represif terhadap kelompok Islam, terjadi paradoks peluang politik:

1. Pemerintah melalui BAKIN diduga melakukan operasi infiltrasi terhadap kelompok Islam radikal.
2. Rezim Orde Baru dipandang oleh sebagian kelompok sebagai thaghut (pemerintahan tidak Islami), yang mendorong munculnya narasi perlawanan.

b. Mobilisasi Sumber Daya

Komando Jihad memanfaatkan:

1. Jaringan eks DI/TII, termasuk anak-cucu Kartosoewirjo yang masih militan.
2. Kondisi geografis Pakenjeng yang terpencil sebagai lokasi persembunyian dan pelatihan.
3. Identitas keislaman lokal sebagai alat rekrutmen dan penggalangan simpati.³²

c. Framing Ideologis

Komando Jihad membingkai perjuangannya sebagai:

1. Jihad fi sabilillah untuk menegakkan syariat Islam.
2. Kelanjutan dari perjuangan Kartosoewirjo yang belum selesai.
3. Perlawanan terhadap rezim sekuler, yang dianggap menghalangi pelaksanaan hukum Islam.³³

3. Analisis Teori Gerakan Sosial terhadap Komando Jihad

1. Penerapan teori mobilisasi sumber daya

Teori mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory) menekankan bahwa keberhasilan sebuah gerakan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan ideologi atau tingkat ketertindasan masyarakat, tetapi oleh kemampuan gerakan tersebut dalam mengakses, mengorganisasi, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini mencakup aspek material, manusia, jaringan,

³² Solahudin, *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*, (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 98–102.

³³ Gilles Kepel, *Jihad: The Trail of Political Islam*, (London: I.B. Tauris, 2002), hlm. 55–60.

pengetahuan, dan legitimasi moral yang dapat menopang keberlangsungan gerakan.³⁴ Dalam konteks Komando Jihad di Pakenjeng, teori ini sangat relevan karena memperlihatkan bagaimana gerakan tersebut mampu bertahan dan berkembang di tengah represi politik Orde Baru melalui pemanfaatan berbagai sumber daya lokal.

Salah satu bentuk sumber daya penting yang dimanfaatkan Komando Jihad adalah warisan historis dan jaringan eks-DI/TII. Setelah penumpasan DI/TII pada awal 1960-an, sebagian pengikut Kartosuwiryo tetap mempertahankan solidaritas dan jaringan sosial mereka, terutama di daerah basis tradisional seperti Garut dan Tasikmalaya.³⁵ Jaringan ini tidak hanya menyediakan legitimasi ideologis, tetapi juga memudahkan distribusi informasi, perekrutan anggota, serta akses terhadap dukungan material dari simpatisan. Dengan demikian, kesinambungan gerakan Islam bersenjata di Priangan dapat dipahami sebagai hasil dari mobilisasi sumber daya yang sudah ada sejak periode sebelumnya.

Selain itu, keberadaan tokoh lokal berperan penting dalam mobilisasi sumber daya manusia. Figur-figur seperti eks-pejuang DI/TII dan tokoh muda religius berhasil menggerakkan masyarakat dengan memanfaatkan karisma dan otoritas moral yang mereka miliki.³⁶ Mereka tidak hanya bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai perekrut dan penghubung antarjaringan. Dalam hal ini, kemampuan personal tokoh lokal menjadi sumber daya kunci yang menopang eksistensi Komando Jihad di Pakenjeng.

Pesantren juga menjadi sumber daya yang krusial. Sebagai lembaga pendidikan dan pusat otoritas keagamaan, pesantren menyediakan ruang bagi pengembangan ideologi jihad dan rekrutmen anggota secara terselubung.³⁷ Infrastruktur pesantren—baik berupa jaringan alumni, otoritas kiai, maupun legitimasi religius—dimanfaatkan oleh Komando Jihad sebagai sarana memperluas

³⁴ Anthony Oberschall, *Social Conflict and Social Movements* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973), hlm. 28–30.

³⁵ C. van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, hlm. 112–113.

³⁶ Ahmad Syafii, *Gerakan Islam di Priangan Timur 1945–1985*, hlm. 134.

³⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, hlm. 45–47.

basis gerakan. Bahkan, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren memungkinkan ideologi jihad memperoleh penerimaan di tingkat akar rumput, meskipun tidak semua pesantren terlibat langsung.

Di samping itu, kondisi sosial-ekonomi Pakenjeng yang relatif terisolasi juga menjadi faktor yang memungkinkan mobilisasi sumber daya berjalan efektif. Keterbatasan akses ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut menimbulkan rasa keterpinggiran, yang kemudian dimanfaatkan oleh tokoh Komando Jihad untuk memperkuat narasi jihad sebagai jalan perubahan.³⁸ Dengan demikian, sumber daya berupa ketidakpuasan sosial dijadikan modal politis untuk memperkuat solidaritas internal gerakan.

Dari analisis ini terlihat bahwa Komando Jihad di Pakenjeng tidak hanya berdiri di atas dasar ideologi keagamaan semata, melainkan juga pada kemampuan konkret dalam memobilisasi sumber daya yang ada. Teori mobilisasi sumber daya dengan demikian membantu menjelaskan bagaimana sebuah gerakan yang relatif kecil dalam skala nasional mampu bertahan cukup lama di tingkat lokal, meskipun menghadapi tekanan keras dari negara.

2. Penerapan teori kesempatan politik

Teori kesempatan politik (political opportunity theory) berangkat dari asumsi bahwa sebuah gerakan sosial akan berkembang apabila terdapat celah atau peluang dalam struktur politik yang memungkinkan gerakan tersebut beroperasi. Peluang politik bisa muncul dari lemahnya kontrol negara, adanya konflik elite, perubahan kebijakan, maupun kondisi sosial tertentu yang membuat negara tidak mampu sepenuhnya menekan gerakan oposisi.³⁹ Dengan kata lain, keberhasilan sebuah gerakan tidak hanya bergantung pada mobilisasi internal, tetapi juga pada bagaimana gerakan tersebut mampu membaca dan memanfaatkan momentum dalam konteks politik yang sedang berlangsung.

Dalam konteks Komando Jihad di Pakenjeng, peluang politik muncul dari situasi pasca-penumpasan DI/TII yang menyisakan jaringan bawah tanah. Walaupun secara formal DI/TII telah dinyatakan berakhir setelah eksekusi

³⁸ Hudaeri, *Islam dan Gerakan Sosial di Priangan*, hlm. 115.

³⁹ Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 76.

Kartosuwiryo pada 1962, struktur ideologis dan jaringan sosialnya masih bertahan di berbagai daerah, termasuk Garut.⁴⁰ Pemerintah Orde Baru berupaya memulihkan stabilitas politik pasca-1965 dengan menumpas sisa gerakan komunis, sehingga fokus utama negara lebih diarahkan pada konsolidasi kekuasaan dan pembangunan ekonomi. Celah ini dimanfaatkan oleh sisa jaringan DI/TII untuk menghidupkan kembali agenda perjuangan negara Islam dalam format baru, yaitu Komando Jihad.⁴¹

Selain itu, politik Orde Baru yang represif justru menciptakan paradoks berupa resistensi di kalangan masyarakat desa yang merasa termarjinalkan. Kebijakan pembangunan yang berpusat di kota-kota besar menyebabkan daerah pedalaman seperti Pakenjeng relatif terabaikan.⁴² Kondisi ini memperkuat narasi tokoh lokal Komando Jihad bahwa negara telah gagal memenuhi keadilan sosial, sehingga perjuangan Islam dipandang sebagai alternatif. Dengan demikian, kesempatan politik bukan hanya berasal dari kelemahan kontrol negara, tetapi juga dari kegagalan distribusi pembangunan yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Peluang lain muncul dari dinamika politik nasional pada 1970-an, terutama dalam hubungan negara dengan umat Islam. Orde Baru berusaha merangkul kelompok Islam moderat sekaligus menekan kelompok Islam radikal. Kebijakan seperti fusi partai politik Islam ke dalam PPP dan pembatasan aktivitas dakwah yang dianggap politis membuat sebagian kalangan Islam merasa terpinggirkan.⁴³ Situasi ini menciptakan ruang bagi Komando Jihad untuk menegaskan diri sebagai wadah perjuangan alternatif di luar jalur politik resmi.

Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa aparat intelijen negara memainkan peran ambivalen dalam fenomena Komando Jihad. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa aparat keamanan sesekali membiarkan bahkan memanfaatkan keberadaan jaringan ini untuk kepentingan politik tertentu, misalnya untuk menakut-nakuti masyarakat terhadap ancaman radikalisme atau untuk melemahkan

⁴⁰ C. van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, hlm. 112–113.

⁴¹ Solahudin, *Nil sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*, hlm. 93–95.

⁴² Hudaeri, *Islam dan Gerakan Sosial di Priangan*, hlm. 115.

⁴³ Martin van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam*, hlm. 25.

posisi kelompok politik Islam lain.⁴⁴ Jika benar demikian, maka hal ini menunjukkan bahwa kesempatan politik bagi Komando Jihad tidak hanya muncul dari kelemahan negara, tetapi juga dari manipulasi politik yang disengaja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Komando Jihad di Pakenjeng tidak bisa dilepaskan dari konteks peluang politik yang tersedia pada masa Orde Baru. Gerakan ini mampu bertahan bukan hanya karena kuatnya ideologi dan mobilisasi internal, tetapi juga karena adanya celah dalam struktur politik nasional maupun lokal yang berhasil mereka manfaatkan.

3. Analisis identitas dan ideologi jihad

Dalam teori gerakan sosial, aspek identitas kolektif dan ideologi merupakan faktor penting yang mengikat anggota gerakan sekaligus membedakan mereka dari kelompok sosial lainnya. Identitas bukan hanya sekadar label, melainkan kesadaran bersama yang lahir dari pengalaman sejarah, nilai agama, serta kondisi sosial yang dihadapi komunitas tertentu.⁴⁵ Ideologi kemudian berperan sebagai panduan normatif yang memberi arah bagi tindakan kolektif. Identitas dan ideologi menjadi sumber legitimasi yang memungkinkan sebuah gerakan bertahan menghadapi tekanan eksternal.

Komando Jihad di Pakenjeng memiliki akar identitas yang kuat dalam sejarah panjang perlawanan Islam di Jawa Barat, terutama warisan DI/TII.⁴⁶ Para pengikutnya memandang diri mereka sebagai penerus sah perjuangan Kartosuwiryo yang berjuang menegakkan syariat Islam dan menolak sistem negara sekuler. Identitas ini diperkuat melalui ikatan genealogis, jaringan pesantren, serta memori kolektif masyarakat pedesaan yang masih menyimpan narasi heroik tentang Darul Islam. Dengan demikian, meskipun secara organisasi DI/TII telah dilumpuhkan, identitasnya tetap hidup di ruang sosial dan menjadi fondasi terbentuknya Komando Jihad.⁴⁷

⁴⁴ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, hlm. 57.

⁴⁵ Alberto Melucci, *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society* (Philadelphia: Temple University Press, 1989), hlm. 34.

⁴⁶ C. van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, hlm. 118.

⁴⁷ Solahudin, *NII sampai II: Salafy Jihadisme di Indonesia*, hlm. 101.

Ideologi jihad yang dianut Komando Jihad tidak sekadar dipahami sebagai perjuangan spiritual individual, melainkan sebagai kewajiban kolektif untuk menegakkan “Negara Islam Indonesia” (NII).⁴⁸ Pemaknaan jihad ini dipengaruhi oleh pemahaman literal terhadap teks agama yang dipadukan dengan pengalaman historis perlawanan terhadap pemerintah kolonial maupun negara pasca-kemerdekaan. Dalam kerangka ideologi ini, negara dipandang sebagai penghalang utama pelaksanaan syariat Islam, sehingga melawannya dianggap sebagai bentuk jihad fi sabilillah.⁴⁹

Identitas jihad tersebut juga diperkuat oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Keterbelakangan, keterpinggiran pembangunan, dan ketidakadilan struktural menjadi faktor yang membuat narasi perjuangan jihad semakin relevan. Tokoh-tokoh lokal Komando Jihad memanfaatkan sentimen ini untuk membangun solidaritas dan menegaskan bahwa identitas mereka berbeda dari masyarakat umum yang tunduk pada negara.⁵⁰ Dengan demikian, jihad tidak hanya bermakna religius, tetapi juga menjadi simbol perlawanan sosial dan politik terhadap dominasi Orde Baru.

Selain itu, ideologi jihad Komando Jihad bercorak eksklusif dan puritan. Mereka menegaskan bahwa hanya mereka yang berjuang di jalan Allah yang benar, sedangkan kelompok Islam moderat atau organisasi keagamaan yang bergabung dengan sistem negara dipandang sebagai kompromistis bahkan menyimpang.⁵¹ Pola pandangan eksklusif ini membuat gerakan semakin solid ke dalam, tetapi sekaligus mempersempit kemungkinan berdialog dengan kelompok Islam lain. Di sisi lain, sikap eksklusif ini juga membuat identitas Komando Jihad semakin menonjol di hadapan pengikutnya.

Dari perspektif teori gerakan sosial, Komando Jihad berhasil membangun identitas kolektif berbasis agama yang terhubung dengan pengalaman sejarah, kondisi sosial, serta ideologi jihad yang radikal. Identitas ini menjadi landasan kuat

⁴⁸ Hudaeri, *Islam dan Gerakan Sosial di Priangan*, hlm. 122.

⁴⁹ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, hlm. 61.

⁵⁰ Martin van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam*, hlm. 28.

⁵¹ Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, hlm. 79.

bagi mobilisasi anggota meskipun menghadapi represi negara. Namun, justru karena identitas dan ideologi yang kaku, Komando Jihad cenderung sulit beradaptasi dengan dinamika politik yang lebih luas, sehingga keberlanjutannya tetap terbatas.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian mengenai konflik dan keamanan, khususnya terkait dengan Gerakan Komando Jihad 1976-1981 di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan yang dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai dinamika gerakan ini serta dampaknya terhadap masyarakat dan kebijakan keamanan nasional.

1. Penelitian Zulkifli (2015) yang berjudul *Radikalisme dan Terorisme di Indonesia: Kajian Historis dan Politis* menggunakan analisis historis dan politis terhadap gerakan radikal di Indonesia. Hasil penelitiannya mengkaji sejarah perkembangan berbagai gerakan Islam radikal di Indonesia, termasuk kemunculan Komando Jihad. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara faktor sosial-politik dan penyebaran ideologi radikal, serta menyoroti bagaimana peran global dalam perkembangan radikalisme di Indonesia, termasuk pengaruh jaringan internasional. Selain itu, penelitian ini mengulas kebijakan pemerintah dalam menghadapi radikalisme dari era Orde Baru hingga masa reformasi, memberikan wawasan mengenai bagaimana strategi negara dalam mengatasi ancaman ekstremisme.
2. Syarif Hidayat (2017) dalam penelitiannya *Dinamika Konflik Sosial di Kabupaten Garut: Studi Kasus Gerakan Keagamaan* menggunakan studi kasus dan analisis konflik sosial di wilayah Garut. Hasil penelitiannya mengidentifikasi pola konflik berbasis agama di Kabupaten Garut yang melibatkan berbagai kelompok keagamaan. Ia mengkaji bagaimana interaksi antara pemerintah daerah, kelompok keagamaan, dan masyarakat berkontribusi terhadap dinamika konflik. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana faktor ekonomi dan ketimpangan sosial turut berperan dalam eskalasi konflik, serta menganalisis peran aparat keamanan dalam meredam ketegangan dan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan di tingkat lokal.

3. Ahmad Fauzi (2018) dalam penelitiannya *Keamanan Nasional dan Tantangan Radikalisme di Indonesia: Sebuah Tinjauan Politik dan Keamanan* menggunakan pendekatan politik dan keamanan dalam melihat ancaman radikalisme. Penelitiannya menelaah dampak gerakan Islam radikal terhadap kebijakan keamanan nasional Indonesia. Kajian ini juga mengkaji strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman dari kelompok seperti Komando Jihad, termasuk operasi militer dan kontra-propaganda yang diterapkan dalam menanggulangi gerakan radikal. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus-kasus terorisme dan radikalisme serta menyajikan perbandingan pendekatan keamanan antara Indonesia dan negara lain dalam menanggulangi ekstremisme.
4. Ridwan Effendi (2020) dalam penelitiannya *Komando Jihad di Jawa Barat: Sejarah, Ideologi, dan Pergerakan* menggunakan studi sejarah dan analisis terhadap gerakan Islam radikal. Penelitian ini menyajikan data mengenai bagaimana Komando Jihad beroperasi di wilayah Jawa Barat, termasuk jaringan dan strategi perekrutannya. Penelitiannya juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keterlibatan individu dalam gerakan ini dan mengupas dampak gerakan ini terhadap stabilitas keamanan lokal di Garut dan daerah sekitarnya. Selain itu, penelitian ini menguraikan peran tokoh-tokoh utama dalam gerakan ini serta bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan situasi politik yang terjadi di Indonesia.
5. Nurul Huda (2021) dalam penelitiannya *Pendekatan Resolusi Konflik dalam Menghadapi Gerakan Radikal di Indonesia* menggunakan analisis terhadap pendekatan resolusi konflik dan kebijakan deradikalisasi. Penelitiannya membahas berbagai pendekatan yang digunakan pemerintah dan masyarakat dalam menangani gerakan radikal. Selain itu, penelitian ini menyoroti efektivitas strategi deradikalisasi yang diterapkan, termasuk program rehabilitasi mantan ekstremis, serta mengulas bagaimana kebijakan kontra-radikalisasi dapat disesuaikan dengan pendekatan berbasis komunitas. Hasil penelitiannya mengusulkan metode yang lebih efektif dalam mencegah

penyebaran ideologi radikal, seperti melalui pendidikan dan penguatan ekonomi lokal.

Penelitian-penelitian di atas memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat dalam menganalisis dinamika konflik dan keamanan terkait dengan Gerakan Komando Jihad di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Dengan mengacu pada kajian terdahulu ini, penelitian yang sedang dilakukan dapat memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab konflik, baik dari aspek ideologi, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengkaji lebih jauh dampak gerakan radikal terhadap keamanan daerah dan nasional, serta bagaimana interaksi antara kelompok-kelompok keagamaan dan pemerintah dalam menangani ancaman tersebut. Kajian ini juga membantu dalam mengevaluasi strategi penyelesaian konflik yang telah diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat serta menilai efektivitasnya dalam jangka panjang.

Dengan semakin detailnya kajian mengenai dinamika konflik dan keamanan ini, penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang memicu gerakan radikal serta bagaimana langkah-langkah yang lebih efektif dapat diterapkan dalam menangani ancaman serupa di masa mendatang. Rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat strategi pencegahan radikalisme dan konflik berbasis keagamaan di Indonesia juga menjadi aspek penting yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah ada.